

## **SKRIPSI**



# **KEWENANGAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKB dan PP) DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PINRANG**

**OLEH  
ANDI MUHAMMAD NATSIR  
B 111 08 375**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**KEWENANGAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKB dan PP) DI BIDANG  
PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PINRANG**

**Oleh**

**ANDI MUHAMMAD NATSIR  
B 111 08 375**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi serjana  
Pada Bagian Hukum Tata Negara  
Program Studi Ilmu Hukum

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **KEWENANGAN BKB DAN PP (BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN) DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MUHAMMAD NATSIR**

**B 111 08 375**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Dan Dinyatakan Diterima

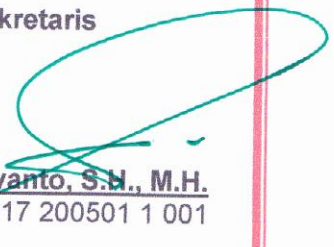
#### **Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.**  
NIP. 19570101 198601 1 001

**Sekretaris**



**Romi Librayanto, S.H., M.H.**  
NIP. 19781017 200501 1 001

**An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

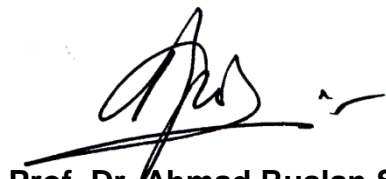
Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa,

Nama : Andi Muhammad Natsir  
Nomor Pokok : B111 08 375  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **KEWENANGAN BADAN KELUARGA  
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN (BKB dan PP) DI BIDANG  
PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN  
PINRANG**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi proposal.

Makassar, 19 April 2013

Pembimbing I



**Prof. Dr. Ahmad Ruslan, S.H., M.H.**  
Nip.195701011986011001

Pembimbing II



**Romi Librayanto, S.H., M.H.**  
Nip.197810172005011001

## PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Muhammad Natsir  
Nomor Pokok : B111 08 375  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **KEWENANGAN KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKB  
dan PP) DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK  
DI KABUPATEN PINRANG**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Makassar, 19 April 2013

An. Dekan  
Pembantu Dekan I,



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
**Nip. 19630419 198903 1 003**

## **ABSTRAK**

**ANDI MUHAMMAD NATSIR, B11108375, Kewenangan Badan KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKB dan PP) Dibidang Pelayanan Publik Di Kabupaten Pinrang, di bawah bimbingan, Prof. Dr. Ahmad Ruslan, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Romi Librayanto, S.H., M.H Selaku Pembimbing II.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di bidang Pelayanan Publik di Kabupaten Pinrang dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam cakupan Kewenangan BKB dan PP di bidang Pelayanan Publik di Kabupaten Pinrang.

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah di Kantor BKKBN atau BKB dan PP Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis yang di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan Kewenangan BKB dan PP di Bidang Pelayanan Publik Di Kabupaten Pinrang. Pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan menggunakan kuesioner, Wawancara, Observasi, Dokumentasi, Keusioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BKB dan PP di Bidang Pelayanan Publik di Kabupaten Pinrang Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan. Dinas Kesehatan mempunyai Kewenangan di bidang Keluarga Berencana (KB), Pelayanan PIK-KRR, KIE, BKB dan arah kebijakan yang di berikan dengan mengetahui angka kematian ibu dan anak, khususnya dibidang Keluarga Berencana. Sedangkan Dinas Kependudukan adalah Mengendalikan Laju pertumbuhan penduduk sehingga tidak terjadi kepadatan penduduk di kabupaten Pinrang, jadi secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah atribusi sebagai mana yang di jelaskan bahwa kewenangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB dan PP) dalam bidang pelayanan publik.

Adapun Hambatan-hambatan dalam cakupan kewenangan BKB dan PP dalam bidang pelayanan publik adalah interpretasi Peraturan Daerah No.18 Tahun 2008 tentang Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, tidak mendorong perkembangan dan kerjasama antara daerah dalam pelayanan publik, keterbatasan pembiayaan mengakibatkan kurangnya pergerakan BKB dan PP di bidang pelayanan publik, kurangnya pergerakan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan tenaga medis yang kurang memadai

## KATA PENGANTAR

**Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEWENANGAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKB dan PP) DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PINRANG”**

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketakwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup bagi penulis. Tak lupa salam dan shalawat kepada Imam Ali bin Abuthalib Amirul Mukmin dan keluarga, terkhusus kepada ibunda Fatimah Az-Zahra. Para sahabat rasulullah dan ahlul bait yang telah memberikan spirit dan mengantar penulis tau tentang arti hidup dan perjuangan menempuh cinta yang hakiki kepada SANG pemilik cinta. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang layak disisiNya dan mempertemukan penulis di alam surga.

Skripsi ini, ku persembahkan kepada ibunda tercinta Hj. Andi. Wani dengan belaian kasih syangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkahku walaupun kami berda diprovinsi yang berlainan. Juga kepada ayahanda tercinta Bapak Drs. H. Andi. Bachtiar Syam yang telah membantu dan menafkahiku dalam menyelsaikan studi penulis dengan penuh perjuangan menempuh hidup yang keras dan penuh rintangan ini, bahkan terkadang berat untuk dilalui dalam keadaan keterbatasan dan penuh ketabahan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa kami harapkan guna memacu kreatifitas dalam menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi. Akhir kata, dengan selesainya penyusunan hasil penelitian ini, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT, Sang Pemberi Wujud yang dalam *uniomystica* senantiasa memberikan karunianya dan memberkati. Dia-lah Sumber Cahaya Murni wujud yang memancar kepada setiap ambiguitas eksistensi yang tidak lain hanyalah namaNya, wajahNya dan tanda-tanda keberadaanNya. Maha Suci Engkau dari semua keterbilangan, keterbatasan, kekurangan, kudititas dan kejamakan. Engkaulah Sang Tunggal yang Tak Berbilang, Tak Terbagi, dan satu dalam kuditasmu. Sungguh, tidak ada yang mengenal diriMu selain Engkau. Izinkanlah aku mengawali perjumpaan dengan-Mu dengan satu letupan ravalusi.
2. Baginda Rasulullah SAW, manifestasi Ilahi yang paling sempurna. Sang manusia suci pemimpin alam semesta. Kota Ilmu dan telaga yang memenuhi dahaga kerinduan sang pecinta. Engkaulah sang kekasih, yang setiap partikel alam semesta senantiasa bershalawat untukmu. Wahai Pemimpinku, semoga keselamatan senantiasa tertuju padamu dan kepada keluargamu yang suci. Wahai pemimpinku, sesungguhnya kerinduan terbesarku adalah untuk bersimpuh dihadapanmu.
3. Kepada orang tua penulis, Drs H AndiBachtiar Syam dan Hj Andi Wani. Yang tidak letih-letihnya memberikan kasih dan sayangnya.
4. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof.Dr.DR.IdrusPatturusi dan Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM beserta jajarannya.
5. Kepada Pembimbing I Prof. Dr. Ahmad Ruslan, S.H., M.H. dan Pembimbing II Romi Librayanto, S.H., M.H. yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pembimbingan dalam penelitian ini. Serta kepada Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H, Ruslan Hambali, S.H., M.H, Muh. Guntur Alfie, S.H., M.H sebagai penguji.
6. Kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah memeberikan pengetahuannya dibidang hukum kepada penulis.



7. Kepada Putri Sheila wanita terindah dalam hidupku. Engkaulah kekasih dan pelabuhan hati. Tempat bersandarnya cinta. Engkaulah yang memberiku pelajaran tentang kesabaran dan indahnya penantian. Terima kasih atas segala perhatian, cinta dan kasih sayang yang telah engkau ajarkan. Sungguh, engkaulah manifestasi jamaliyah-Nya. Yang memberikan kehidupan dan dari dirimulah akan lahir generasi-generasi intelektual yang akan mencerdaskan manusia. Sungguh, aku mencintaimu karena aku melihat TUHAN dalam dirimu.
8. Kepada anak-anak Notaris 08 Fakultas Hukum UNHAS, maaf namanya tidak bias saya sebutkan semuanya. Tapi, kalian adalah generasi terbaik yang pernah ada.
9. Kepada Andi Riza Fardiansyah, S.H, Al-Kadri Nur, Sayyid Muhammad Faldy, S.H, Muhammmad Rizal Rustam, S.H, Muhammad Irwan, S.H, Wiryawan Batara Kencana, S.H, Muhammad Firmansyah, Ali Rahman, Arfan Ardin, S.H, Ade Dwi P, S.H, Manggolo Yudho Perdana, S.H, Yuda Sudawan, Irtanto Hadi Saputra, S.H, Andi Aqmal Firdaus, Suwahyu, Vidya Meisal Annisa, Mariani, S.H, Dewi Carla Pratiwi, S.H, Nurul Hani Pratiwi, S.H, Wahdaniya Ali, S.H, Andi Djuari Iskandar dan seluruh teman-teman HMI Komisariat Hukum UNHAS .
10. Rekan –rekan KKN Reguler Gel. 82 Lokasi Kab.Pinrang Kecamatan Watang Sawitto Kelurahan Sipatokkong : Vidya Meisal Annisa, Aman Wijaya, Amrul Yahya, Muhammad Hudari, Nadia, Mistri A muin, NurBaya, Nur Khasima, Putri Sheila, Erzal, Ira, Uci.
11. Ibu Hj. Sanni, Cece, Uni yang selalu menyiapkan sarapan yang hangat untuk menjalani kuliah di pagi hari.
12. Kepada Fachruddin Syarifuddin, Andika Maulana, Fuad Rosag, Muh Irfan Ilham, Yusra Hadi, Ahmad Arief S.E dan seluruh Teman-teman seperjuangan saya selama berada di Makassar.

semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata Penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar,   Maret 2013

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Lembaga Negara.....	12
1. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 .....	12
2. Lembaga Negara Utama ( <i>Primary State Organ</i> ).....	17
3. Lembaga Negara Penunjang ( <i>State Auxiliary Organ</i> ) .....	30
B. Teori Kewenangan .....	35
1. Pengertian Teori .....	35
2. Pengertian Kewenangan.....	37
C. Pelayanan Publik.....	44

1. Defenisi Pelayanan Publik .....	44
2. Etika Pelayanan Publik .....	49
D. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB dan PP).....	52
E. Dasar Hukum Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB dan PP).....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Lokasi Penelitian .....	59
B. Jenis dan Sumber Data .....	59
C. Teknik Pengumpulan Data .....	60
D. Analisis Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Kewenangan BKB dan PP Di Bidang Pelayanan Publik Di Kabupaten Pinrang.....	61
B. Hambatan-hambatan Kewenangan BKB dan PP Dalam Bidang Pelayanan Publik di Kabupaten Pinrang .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xii</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan adalah tiga fondasi dasar dalam melakukan analisa dan klasifikasi pada sebuah Negara.

Bentuk Negara adalah pembahasan tentang bagaimanakah konsep dasar tentang bentukan sebuah Negara. Apakah Negara itu adalah sebuah negara kesatuan yang menghilangkan kewenangan setiap daerah yang menjadi unsurnya untuk mengatur diri mereka sendiri ataukah kita akan berbicara tentang sebuah negara yang lahir berdasarkan sebuah perjanjian persatuan antara daerah-daerah yang lebih dikenal dengan istilah federal.

Bentuk Pemerintahan adalah diskursus tentang asal muasal kewenangan pemerintahan dalam sebuah negara. Dalam topik ini, negara di dunia hanya terbagi kedalam 2 (dua) kategori besar, Monarki dan Republik. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang menjadikan kekuasaan mutlak raja sebagai sumber kewenangan pemerintahan. Sedangkan, Republik adalah bentuk pemerintahan yang mendasarkan kewenangan pemerintahan sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat.

Dengan telah dilaksanakannya otonomi secara utuh sejak tahun 2001, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

peraturan daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang-bidang yang berdasar Undang-Undang telah ditetapkan sebagai kewenangan Pusat. Keleluasaan otonomi ini mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Pembagian Urusan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pada dasarnya seluruh kewenangan ada di Daerah, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Secara rinci pembagian kewenangan antara Pusat dan Provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan kewenangan Kabupaten/Kota adalah seluruh kewenangan di luar yang telah menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi. Kewenangan Pusat di luar 5 kewenangan yang tidak diserahkan adalah kewenangan yang bersifat perencanaan makro, penetapan pedoman, norma, kriteria, dan standar. Sementara kewenangan Provinsi adalah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

Dengan desentralisasi ini, maka secara umum hal-hal yang berkait dengan stabilisasi dan distribusi dilakukan oleh Pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi (Pemerintah Pusat), sementara fungsi alokasi

akan lebih banyak dilaksanakan oleh Daerah, karena Daerah lebih dekat kepada masyarakat sehingga dapat diketahui prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat.

Terkait dengan penyelenggaraan Keluarga Berencana Nasional, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak, serta kewenangan untuk menetapkan pedoman pengembangan kualitas keluarga. Terlihat jelas di sini bahwa yang masih termasuk sebagai kewenangan Pusat (yang akan dilaksanakan oleh BKKBN secara langsung) adalah kewenangan yang sifatnya makro seperti perencanaan, penetapan kebijakan nasional, dan pedoman. Sementara kewenangan selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, merupakan kewenangan Daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 43 disebutkan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Menurut pendapat (Dr. Sugiri Syarief, MPA) Kepala BKKBN dalam melaksanakan tugas tersebut. BKKBN menyelenggarakan fungsi :

- a) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN
- c) fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan Instansi pemerintah, swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat dan masyarakat di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Begitupun dalam kewenangan BKKBN (Dr. Sugiri Syarief, MPA)

memberikan pendapat sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c) Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak;
- d) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu :
  - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - 2) perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.



Pertumbuhan penduduk saat ini merupakan isu yang sangat populer dan mencemaskan negara-negara di dunia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas sumberdaya manusia. Fenomena ini diistilahkan oleh para ahli dengan istilah lonjakan penduduk (*population explosion* atau *population bomb*).

Isu lonjakan penduduk juga menjadi perhatian Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2010 yaitu 237.641.326 jiwa, dimana angka pertumbuhan sebesar 3,5 juta jiwa setiap tahunnya. Jumlah penduduk yang sangat besar dan kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan tentu akan menjadi suatu permasalahan yang besar bagi Indonesia di masa mendatang.

Sebagai upaya penanggulangan masalah kependudukan, pemerintah Indonesia telah mencanangkan dan melaksanakan berbagai program kependudukan dan keluarga berencana. Upaya nyata tersebut diwujudkan dengan ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Melalui lembaga tersebut, diharapkan mejadi salah satu alat untuk mengatasi kekhawatiran atas tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia.

BKKBN merupakan lembaga yang berstatus sebagai lembaga pemerintahan non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. BKKBN memiliki tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dalam bentuk fungsinya sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 4) penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 5) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 6) Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Selain fungsi tersebut di atas, BKKBN juga menyelenggarakan fungsinya, yaitu:

- a) Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- b) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; serta
- e) Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Lembaga pemerintahan non kementerian ini terus berupaya melakukan tindakan guna mewujudkan misi yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan pada setiap masyarakat serta mewujudkan keluarga Indonesia sebagai keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan dan kampanye-kampanye kepada seluruh masyarakat.

BKKBN pernah sukses dengan slogan “dua anak cukup, laki-laki dan perempuan sama saja”. Namun, berbagai pihak menganggap bahwa slogan ini cukup melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, BKKBN

terus berupaya mencari alternatif agar program keluarga berencana dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia. BKKBN juga terus melakukan inovasi guna mewujudkan visi untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk pada 2015.

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai populasi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Menurut data dari [Tribunnews.com](http://Tribunnews.com) Indonesia berada pada posisi ke empat jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduknya sebanyak 257.516.167 juta jiwa dengan luas kurang lebih 1.904.562 km<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk yang semakin besar ini tentu membawa tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan pelayanan publik. Dari hasil data di atas pemerintah Indonesia harus melakukan tindakan agar dapat meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, dan salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu memaksimalkan peranan Badan atau instansi yang kompeten dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk.

Didalam proses meminimalisir pertumbuhan penduduk harus dilakukan dengan beberapa tahap-tahap yang sudah di desain sedemikian baiknya agar pada saat melaksanakan proses tersebut dapat berjalan dengan baik, karena setiap saat pertumbuhan penduduk dapat berubah-ubah, maka dari itu pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah

penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya atau perbandingan populasi yang dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam suatu populasi.

Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah ialah memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat atau ajakan-ajakan yang dapat merubah pola pikir masyarakat tentang perlunya meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk, dan untuk menunjang keberhasilan proses ini peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan, karena apabila masyarakat hanya menjadi pendengar saja tanpa ada respon yang dilakukan, semuanya hanya akan menjadi suatu yang tidak berarti dan boleh dikatakan tidak ada manfaat yang dapat mereka peroleh.

Namun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi hambatan-hambatan dalam menjalankan program ini. Hal ini disebabkan oleh hal-hal teknis dan non teknis yang dapat mempengaruhi misalnya, kurangnya kemampuan dalam mengemban dan menjalankan tugasnya serta penyediaan fasilitas yang terbatas. Hal ini sangat berkaitan erat dengan proses untuk meminimalisir pertumbuhan penduduk yang ada di Negara kita baik dalam skala nasional maupun di tingkat daerah, bertolak dari hal itu dapat dijadikan suatu tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan proses pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam sebagai bahan Penulisan Hukum tentang **“KEWENANGAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKB dan PP) DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PINRANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dikemukakan rumusan masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut diatas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah yaitu :

- 1) Sejauh mana kewenangan BKB dan PP di bidang Pelayanan Publik di Kabupaten Pinrang ?
- 2) Apa hambatan-hambatan dalam cakupan kewenangan BKB dan PP di Kabupaten Pinrang dalam bidang Pelayanan Publik?

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu :

- a) Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan BKB dan PP di bidang Pelayanan Publik di Kabupaten Pinrang.
- b) Untuk mengetahui apa-apa sajakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewenangan BKB dan PP di Kabupaten Pinrang dalam bidang Pelayanan Publik.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya khususnya dalam Hukum Tata Negara.
- b. Bermanfaat bagi penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada khususnya terutama ilmu Hukum Tata Negara.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai kewenangan BKB dan PP di bidang pelayanan publik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Lembaga Negara

##### 1. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan yaitu organ dan *functie*<sup>1</sup>. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya (Inggris: *form*, Jerman: *vorm*), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai dengan maksud pembentukannya<sup>2</sup>.

Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula disebut eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dalam peraturan yang lebih rendah.<sup>3</sup>

Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebutkan keberadaannya dalam UUD 1945, yaitu:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 1945 yang diberi judul "*Majelis Permusyawaratan*

---

<sup>1</sup>*Ibid.*, hlm. 12

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 12



*Rakyat*". Bab III ini berisi 2 pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri atas tiga ayat, Pasal 3 yang juga terdiri atas 3 ayat;

- 2) Presiden yang diatur keberadaannya dalam BAB III UUD 1945, dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai kekuasaan pemerintahan negara yang berisi 17 pasal;
- 3) Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu pada ayat (2) UUD 1945 itu menegaskan, "*dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden*";
- 4) Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V UUD 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3);
- 5) Menteri Luar Negeri sebagai menteri *triumvirat* <sup>4</sup>yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yaitu bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan presiden dan wakil presiden;
- 6) Menteri Dalam Negeri sebagai *triumvirat* bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945;

---

<sup>4</sup>*Triumvirat* adalah pemerintah atau kekuasaan yang dipegang oleh tiga orang atau lembaga sebagai suatu kesatuan.

- 7) Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai menteri *triumvirat* menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri, karena dapat saja terjadi konflik atau sengketa kewenangan konstitusional diantara sesama mereka, atau antara mereka dengan menteri lain atau lembaga negara lainnya;
- 8) Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berbunyi, "*Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, dan selanjutnya diatur dalam undang-undang*";
- 9) Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2);
- 10) Konsul yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1);
- 11) Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan ayat (7) UUD 1945;
- 12) Gubernur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- 13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
- 14) Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;

- 15) Bupati Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- 16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- 17) Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
- 18) Walikota Kepala Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- 19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur oleh Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
- 20) Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, diatur dengan undang-undang.
- 21) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam BAB VII UUD 1945 yang berisi Pasal 19 sampai Pasal 22B;
- 22) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam BAB VIIA yang terdiri atas Pasal 22C dan 22D;
- 23) Komisi Penyelenggaraan Pemilu (KPU) yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;
- 24) Bank Sentral yang disebut eksplisit oleh Pasal 23D;
- 25) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab VIIIA dengan judul "*Badan Pemeriksa Keuangan*",

- dan terdiri atas tiga pasal, yaitu Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F (2 ayat), dan Pasal 23G (2 ayat);
- 26) Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;
  - 27) Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945;
  - 28) Komisi Yudisial (KY) yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 195;
  - 29) Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XII tentang pertahanan dan keamanan negara, pada Pasal 30 UUD 1945;
  - 30) Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
  - 31) Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
  - 32) Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
  - 33) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga diatur dalam BAB XII Pasal 30 UUD 1945;
  - 34) Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti Kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi,  
*“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.*

Dari segi sifatnya dari lembaga tersebut diatas, ada yang bersifat lembaga-lembaga negara yang utama (*primary state organs*) dan ada pula

yang bersifat lembaga-lembaga penunjang atau sekunder (*auxiliary state organs*)<sup>5</sup>.

## **2. Lembaga-lembaga Negara utama (*Primary state organ*).**

Setelah mengidentifikasi kewenanganyang dimiliki oleh lembaga-lembaga Negara dalam UUD 1945 setelah empat kali diubah, maka dari kewenanganyang dimiliki masing-masing lembaga tersebut dapat dikualifikasi letak dari sebuah lembaga Negara menurut teori *trias politic* yang dimaksud oleh Montesquieu yang terdiri dari tiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

### **a. Lembaga Legislatif**

Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Setelah mengidentifikasi kewenangan lembaga-lembaga Negara dalam UUD 1945 setelah empat kali diubah, maka dapat disebutkan lembaga legislasi di Indonesia adalah:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat
- 2) Presiden

### **b. Lembaga Yudikatif**

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dipimpin oleh sebuah mahkamah agung (*supreme court*). Macam-macam kekuasaan kehakiman tidak sama disemua Negara tetapi biasa terdiri dari peradilan umum

---

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 179.

dan militer. Disamping kekuasaan mengadili, pada Negara-negara federal, mahkamah agung biasanya disertai kekuasaan menguji undang-undang. Contohnya mahkamah agung di Jepang mempunyai kekuasaan *judicial review*, sedangkan Indonesia, mahkamah agung hanya berhak menguji semua peraturan perundang-undangan yang tingkatnya dibawah undang-undang. Sedangkan lembaga kewenangan melakukan *judicial review* terhadap undang-undang adalah mahkamah konstitusi.

c. Lembaga Eksekutif

Eksekutif adalah lembaga yang menjalankan atau melaksanakan pemerintahan secara operasional dan sehari-hari Lembaga ini dipimpin oleh kepala negara.

- I. Presiden, sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari pada sebuah negara
- II. Wakil presiden, jabatan pemerintahan yang berada satu tingkatan lebih rendah dari pada presiden. Wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden apabila ia berhalangan sementara atau teetap.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai

lembaga-lembaga negara yang utama (*primary state organs*), yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga legislatif yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara dimana MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Seperti dinyatakan terdahulu, para pendiri negara (*the founding fathers*) menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang membawahi beberapa lembaga tinggi negara, tetapi setelah amandemen, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Penghapusan lembaga tertinggi negara adalah upaya logis untuk keluar dari perangkat desain ketatanegaraan yang rancu dalam menciptakan mekanisme *check and balances* di antara lembaga-lembaga negara. Hal ini dapat lihat dari hasil amandemen Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dari “*kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR*” menjadi “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*”.

Menurut Saldi Isra, perubahan terhadap pasal 1 ayat (2) berimplikasi pada 2 (dua) hal : Pertama, reposisi peran MPR dari lembaga tertinggi negara (*supreme body*) menjadi gabungan antara DPR dan DPD”; Kedua, kewenangan MPR dari menetapkan GBHN dan memilih

presiden dan wakil presiden menjadi mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD, dan jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.<sup>6</sup>

## 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Sebelum perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara tertinggi. Di bawahnya terdapat lima lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara termasuk DPR. DPR merupakan lembaga negara yang memiliki posisi yang kuat dalam ketatanegaraan Indonesia dan senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan presiden. Bahkan, jika DPR menganggap bahwa presiden melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 atau oleh

---

<sup>6</sup>Saldi Isra, "Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat, Sistem Trikameral di Tengah Supremasi DPR", Jurnal Konstitusi, Vol. 1, Nomor 1, Juli 2004, hlm. 127.



MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa guna meminta pertanggung jawaban presiden.

Setelah amandemen, DPR mengalami perubahan, fungsi legislasi yang sebelumnya berada di tangan presiden, maka setelah amandemen UUD 1945 fungsi legislasi berpindah ke DPR. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan secara substansial Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa :

*“presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR”.*

Akibat dari perubahan itu adalah hilangnya dominasi presiden dalam proses pembentukan undang-undang.

### 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Reformasi pada lembaga legislatif di antaranya adalah perubahan sistem *unicameral*<sup>7</sup> (yang telah menempatkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi atau supremasi MPR) menuju sistem *bicameral*<sup>8</sup> dengan mengadakan perubahan komposisi MPR, dimana keanggotaan MPR

---

<sup>7</sup>Unicameral adalah parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar kerja. Sumber: (<http://ahluddin-saiful.blogspot.com/2011/10/tipe-parlemen-indonesia.html>).

<sup>8</sup>Bicameral adalah parlemen yang terdiri dari dua kamar kerj. Sumber: (<http://ahluddin-saiful.blogspot.com/2011/10/tipe-parlemen-indonesia.html>).

terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD yang kesemuanya dipilih melalui pemilihan umum.

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (*senate* atau *upperhouse*) dimaksudkan agar mekanisme *check and balances* dapat berjalan relative seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan kebijakan di daerah. Menurut Ramlan Sarbakti, beberapa pertimbangan Indonesia membentuk DPD: *Pertama*, distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan terlampau besar terkonsentrasi di Pulau Jawa; *Kedua*, sejarah Indonesia menunjukkan anspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat kuat, yaitu adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus.<sup>9</sup>

#### 4) Lembaga Kepresidenan

Yang dimaksud lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi dua jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Kekuasaan pemerintahan negara oleh presiden diatur dan ditentukan dalam BAB III UUD 1945 yang memang diberi judul Kekuasaan Pemerintahan Negara. BAB III UUD 1945 ini berisi 17 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimiliki dalam memegang kekuasaan pemerintah.

---

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, hlm. 196.

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, lazimnya, keduanya dipilih dalam satu paket pemilihan. Keduanya tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan karena alasan politik. Sebab, jika karena alasan politik, maka keduanya harus berhenti secara bersama-sama. Akan tetapi, jika ada alasan yang bersifat hukum (pidana), maka sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam hukum, pertanggung jawaban pidana pada hakekatnya bersifat individual (*individual responsibility*). Siapa saja diantara keduanya yang bersalah secara hukum, atas dasar itu ia dapat diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, peran penting seorang Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden, pertama-tama adalah sebagai pengganti (*reserved power*). Sebagai pengganti Presiden, Wakil Presiden dapat bertindak untuk jangka waktu sementara atau dapat juga bertindak untuk masa seterusnya sampai masa jabatan Presiden habis. Peran *kedua*,

Wakil Presiden adalah sebagai wakil yang mewakili presiden dalam melaksanakan tugas-tugas kepresidenan, dalam hal-hal tertentu kepadanya didelegasikan oleh presiden. *Ketiga*, Wakil Presiden juga dapat bertindak membantu Presiden melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban Presiden. Kualitas bantuan Wakil Presiden itu jelas berbeda tingkatannya dengan bantuan yang diberikan oleh para Menteri, yang juga biasa disebut sebagai pembantu Presiden.<sup>10</sup>

#### 5) Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung merupakan pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan bahwa,

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

Kemudian terkait dengan fungsi serta susunan dan kedudukan kelembagaan dan hakim agung diatur dalam ketentuan Pasal 24A yang menyebutkan:

- a) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

---

<sup>10</sup>Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 172.

- b) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- c) Calon Hakim Agung akan diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.
- d) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- e) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

#### 6) Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru dalam cabang kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi yudikatif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945 diatur tentang kewenangan dan kewajiban serta mekanisme dalam pengisian hakim MK menyebutkan:

- a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- c) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, dan diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- d) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- e) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- f) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang.

## 7) Komisi Yudisial (KY)

Keberadaan Komisi Yudisial merupakan organ/ lembaga negara yang berada di dalam lingkup kekuasaan yudikatif, diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan:

- 1) *Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*
- 2) *Anggota komisi yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.*
- 3) *Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- 4) *Susunan, kedudukan, dan keanggotaan komisi yudisial diatur dengan undang-undang.*

## 8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan organ atau lembaga negara yang menjalankan kekuasaan eksaminatif. Badan ini diatur di dalam ketentuan Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G UUD 1945, yang secara intinya menjelaskan bahwa:

- a) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- b) Berwenang mengawasi, dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD, dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
- c) Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

- d) Memiliki Integrasi dan kepribadian tidak tercela sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

Sedangkan dari segi hierarkinya lembaga negara itu dibedakan kedalam tiga lapis yaitu:<sup>11</sup>

1. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, dimana nama, fungsi, dan kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD 1945. Adapun yang disebut sebagai organ-organ konstitusi pada lapis pertama atau dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yaitu:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden,
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
  - c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
  - d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
  - e. Mahkamah Konstitusi (MK),
  - f. Mahkamah Agung (MA),
  - g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, di mana dalam lapis kedua ini, ada lembaga yang sumber kewenangannya dari undang-undang dan sumber kewenangannya bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. *Kelompok pertama* yaitu

---

<sup>11</sup> Jmly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Op.cit., hlm, 105.



organ konstitusi yang mendapat kewenangan dari UUD misalnya Menteri Negara, Komisi Yudisial (KY), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral; *Kelompok kedua*, organ istitusi yang sumber kewenangannya adalah undang-undang, misalnya seperti Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komii Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang, misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.

3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah, yakni merupakan lembaga negara yang ada di daerah yang dimana ketentuannya telah diatur oleh UUD 1945, yaitu: Pemerintahan Daerah Provinsi; Gubernur, DPRD Provinsi; Pemerintah Daerah Kota; Walikota, DPRD Kota; Pemerintah Daerah Kabupaten; Bupati, DPRD Kabupaten. Di samping itu, di dalam UUD 1945 disebutkan pula adanya satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh UUD, sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional.

#### **4. Organ Negara penunjang (*State Auxiliary Organ*)**

Lembaga-lembaga khusus atau 'special agencies' merupakan gejala yang dapat dikatakan baru dalam dinamika penyelenggaraan kekuasaan negara modern. Menurut doktrin Montesquieu yang sebenarnya tidak pernah diterapkan dalam praktik yang nyata, lembaga-lembaga negara diidealkan hanya terdiri atas tiga lembaga utama penyelenggaraan kekuasaan negara, yaitu parlemen, pemerintah, dan pengadilan yang mencerminkan fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan judicial. Namun, sejak akhir abad ke 19, dengan munculnya tuntutan agar negara mengambil peran lebih besar dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka jumlah lembaga-lembaga negara menjadi bertambah banyak pula sesuai dengan tuntutan kebutuhan menurut doktrin negara kesejahteraan (welfare state).

Namun, sampai pertengahan abad ke-20, peran negara berkembang ekstrim sehingga pada akhir abad ke-20 berkembang pula kesadaran baru untuk mengurangi peran negara melalui pelbagai kebijakan liberalisasi, baik di bidang politik maupun ekonomi. Gelombang liberalisasi politik membawa akibat munculnya gelombang (i) demokratisasi dan (ii) desentralisasi, sedangkan liberalisasi ekonomi melahirkan kebijakan-kebijakan (i) efisiensi, (ii) deregulasi, (iii) debirokratisasi, dan (iii) privatisasi. Mulai tahun 1970-an, gerakan-gerakan ini berkembang luas sehingga menyebabkan terjadinya restrukturisasi bangunan organisasi negara dan pemerintahan secara besar-besaran.

Sebagian fungsi yang sebelumnya ditangani oleh negara diserahkan kepada masyarakat atau dunia usaha untuk mengelolanya. Fungsi-fungsi yang sebelumnya ditangani oleh pemerintahan pusat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintahan daerah.

Bersamaan dengan itu, bentuk-bentuk organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan negara juga berubah pesat. Fungsi-fungsi yang sebelumnya bersifat eksklusif legislative, eksekutif, atau yudikatif, mulai dirasakan tidak lagi mencukupi, sehingga doktrin pemisahan kekuasaan tidak lagi dianggap ideal. Yang dianggap lebih ideal justru adalah prinsip *checks and balances* atau prinsip pembagian kekuasaan atau '*sharing of power*'. Bahkan (i) untuk kepentingan efisiensi, muncul kebutuhan untuk melembagakan kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi menjadi satu kesatuan ke dalam fungsi yang bersifat campuran. Pertimbangan (ii) lain adalah munculnya kebutuhan untuk mencegah agar fungsi-fungsi kekuasaan tertentu terbebas dari intervensi politik dan konflik kepentingan. Karena kedua alasan inilah maka sejak akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, banyak bermunculan lembaga-lembaga baru di luar struktur organisasi pemerintahan yang lazim.

Lembaga-lembaga baru ini ada yang disebut sebagai dewan, badan, atau lembaga, ada pula yang disebut komisi-komisi negara. Ada pula yang bersifat *ad hoc* yang disebut dengan istilah satuan tugas atau komite. Di Indonesia sendiri selama ini dikenal adanya istilah Lembaga

Pemerintahan Non-Departemen (LPND) yang setelah ditetapkannya UU tentang Kementerian Negara yang mengubah istilah departemen menjadi kementerian, maka istilah LPND itu harus diubah menjadi LPNK atau Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Namun, atas inisiatif beberapa kementerian, ada pula istilah lain yang diperkenalkan, yaitu Lembaga Non-Struktural (LNS).

Dalam banyak literatur, ada juga yang menggunakan istilah '*independnet bodies*', '*auxiliary agencie*', '*self regulatory bodies*', dan sebagainya. Semua istilah-istilah itu tidak dapat dipakai untuk pengertian yang bersifat umum sebab masing-masing lembaga dimaksud mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri. Ada bersifat independen, ada yang tidak, dan ada pula yang terkait langsung dengan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, judikatif, dan ada pula yang bersifat campuran. Agar bersifat umum, semua lembaga-lembaga itu, karena sifatnya yang khusus di luar struktur kementerian yang lazim dapat saja kita sebut dengan istilah lembaga-lembaga khusus (*special agencies*).

Namun, untuk mengetahui secara lebih mudah berbagai lembaga khusus dalam struktur organisasi negara dan pemerintahan kita, ada baiknya kita melihatnya dari keseluruhan konfigurasi kelembagaan negara dan pemerintahan kita saat ini. Karena setelah reformasi 12 tahun terakhir, format dan bangunan organisasi kelembagaan Negara dan pemerintahan kita secara keseluruhan memang perlu dievaluasi dan dikonsolidasikan kembali. Selama era reformasi ini, ada kecenderungan

setiap kali kita membuat UU, selalu diiringi oleh keinginan dan kebutuhan rasional untuk membentuk lembaga baru. Demikian pula dalam 4 naskah Perubahan UUD 1945, telah lahir begitu banyak subjek hukum kelembagaan baru, yang kesemuanya dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga Negara baru.

Masing-masing lembaga baru itu, apabila diteliti satu per satu, niscaya mengandung ide yang sangat baik dalam dirinya masing-masing. Namun, sesudah 12 tahun reformasi, apabila keseluruhan konfigurasi kelembagaan yang ada itu dilihat secara sistematis dan seksama, maka niscaya kita akan mengetahui adanya inefisiensi dan bahkan kekacauan dalam sistem fungsi kelembagaan Negara kita. Oleh karena itu, Kantor Menpan harus mengambil peran strategis untuk mengaudit keseluruhan sistem dan fungsi kelembagaan negara dan pemerintahan kita dewasa ini. Audit fungsi oleh Menpan dapat dilengkapi dengan audit kinerja oleh BPK dan audit hukum oleh Sekneg secara menyeluruh dan sebaik-baiknya. Maka dari itu dalam keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga non departemen dalam bab 1 menuliskan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan menjelaskan pasal 1 yaitu lembaga non departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden dan lembaga non departemen berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada presiden selanjutnya dalam pasal 2 menjelaskan lembaga non departemen mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada pasal 3 menyebutkan ada beberapa lembaga non departemen dalam pemerintahan Indonesia yang terdiri dari 25 lembaga yaitu :

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL;
7. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
8. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
10. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
11. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
12. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
13. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
15. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;

16. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
18. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
19. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
20. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
21. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
22. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
23. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
24. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
25. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP

## **B. Teori Kewenangan**

### **1. Pengertian Teori**

Terdapat pemahaman bahwa istilah "teori" bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya. Bahkan teori sering ditafsirkan sebagai istilah tanpa makna apabila tidak berkaitan dengan kata yang menjadi padanannya, misalnya teori ekonomi, teori social, teori hukum, dan lain-lain, sehingga kata yang menjadi padanannya menjadi seolah-olah lebih bermakna ketimbang istilah atau makna dari teori itu sendiri. Teori pada akhirnya pada akhirnya hanya menjadi kajian kebahasan atau metodologi. Pada tataran tertentu istilah "teori" apabila dipadankan dengan kata sesudahnya, misalnya teori ekonomi, teori hukum dan lain-lain, maka akan berkembang menjadi

sebuah disiplin yang khusus dan mandiri serta memiliki objek kajian yang khusus dan mandiri pula.<sup>12</sup>

Istilah teori berasal dari kata "theoria" dalam bahasa latin yang berarti "perenungan" yang digali dari kata "thea" dalam bahasa yunani, yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dari kata dasar "thea" ini pula datang kata modern "theater" yang berarti "pertunjukan" atau "tontonan". Dalam banyak literatur beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.

Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Sedangkan menurut Sarantakos, teori adalah suatu set atau kumpulan atau koleksi atau gabungan "proposisi" yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurutnya "teori" dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.

Berbeda halnya dengan A. Hamid S. Attamimi<sup>13</sup> berpendapat bahwa teori adalah sekumpulan pemahaman-pemahaman, titik-titik tolak, dan asas-asas yang saling berkaitan, yang memungkinkan kita memahami

---

<sup>12</sup> | Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal. 20.

<sup>13</sup> | Gede Panjta Astawa dan Suprin Na'a, Memahami.Op Cit., Hal. 22.



lebih balk terhadap sesuatu yang kita coba untuk mendalaminya. Secara umum dan abstrak, kata "teori" dapat juga diartikan sistem dan tats hubungan yang logik dan definitorik di antara pemahaman-pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa-hipotesa yang diuji padanya

## **2. Pengertian Kewenangan**

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikianpula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai "*blote match*"<sup>15</sup> sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang

---

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Op. Cit., Hal. 35-36

<sup>15</sup> Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlanga, Surabaya, 1990. Hal. 30.

berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.<sup>16</sup>

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>17</sup> Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijaksanaan; dan f) kebajikan.<sup>18</sup>

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> A. Gunawan Setiandjaja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990 Hal. 52.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, Hal. 1.

<sup>18</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, Hal. 37-38.

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, Hal. 35.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.<sup>20</sup> Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheic*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Rusadi Kantaprawira, Op. Cit., Hal. 39.

<sup>21</sup> Phillipus M. Hadjon, Op Cit, Hal. 20.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.<sup>22</sup> Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu li *onderdee'* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah "*Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van Bestuurechtt elijkebevoegd hedendoor publiekrecht elijkerechtss ubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer*" (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan

---

<sup>22</sup>Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), Hal. 22.

penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).<sup>23</sup>

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi baik secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain.

Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

---

<sup>23</sup> Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, Hal. 4.

Mengenai atribusi, J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Sedangkan Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.<sup>24</sup>

1. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, Op. Cit, Hal. 5.

kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.<sup>25</sup>

## **C. Pelayanan Publik**

### **1. Definisi pelayanan publik**

Definisi Pelayanan Publik Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara). Apalagi saat ini masyarakat semakin sadar apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengontrol apa yang dilakukan pemerintahannya. Dan ada pula menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pelayanan Publik adalah segala

---

<sup>25</sup> F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, Hal. 219.



kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Menurut Wikipedia Indonesia, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, maupun perusahaan pengangkutan.
2. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik yang bersifat primer adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara sehingga klien/pengguna mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara, dan pelayanan perizinan.
3. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik yang bersifat sekunder adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan. Tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan. Terdapat beberapa karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggara pelayanan publik tersebut, yaitu:

1. Adaptabilitas layanan. Artinya derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
2. Posisi tawar pengguna/klien Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
3. Tipe Pasar Menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada dan hubungannya dengan pengguna/klien
4. Kontrol Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna atau penyelenggara pelayanan.
5. Sifat pelayanan Menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.

Oleh sebab itu, pelayanan publik harus dilakukan secara profesional sehingga mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah) dengan ciri sebagai berikut:

1. Efektif Lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran

2. Sederhana Prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit.
3. Transparan adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur, persyaratan, dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik tersebut.
4. Efisiensi Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan.
5. Keterbukaan Berarti prosedur/tatacara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib di informasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak
6. Ketepatan waktu Kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
7. Responsif lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dalam aspirasi masyarakat yang dilayani.

Adaptif adalah cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang

senantiasa mengalami tumbuh kembang. Cara-cara yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional adalah sebagai berikut:

1. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya,
2. Memperlakukan pengguna pelayanan sebagai customers,
3. Berusaha memuaskan pengguna pelayanan sesuai dengan yang diinginkan mereka,
4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas,
5. Menyediakan alternatif bila pengguna pelayanan tidak memiliki pilihan lain.

## **2. Etika Pelayanan Publik**

Pelayanan publik merupakan suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Atau dengan kata lain penggunaan atau penerapan standar-standar etika yang telah ada sebagai tanggung jawab aparatur birokrasi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan bagi kepentingan publik.

Fokus utama dalam etika pelayanan publik adalah apakah aparaturnya pelayanan publik telah mengambil keputusan dan berperilaku yang dapat dibenarkan dari sudut pandang etika (agar manusia mencapai kehidupan yang baik). Apabila dikaitkan dengan birokrasi maka etika birokrasi merupakan panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan integritas dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Perilaku pelayan publik (Pegawai Negeri) harus sejalan dengan misi pelayanan publik dari instansi tempat mengabdikan
2. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diandalkan.
3. Warga Negara memperoleh perlakuan “tanpa pandang bulu” sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan.
4. Sumber daya digunakan secara tepat, efisien, dan efektif.
5. Prosedur pengambilan keputusan adalah transparan bagi publik, dan tersedia sarana bagi publik untuk melakukan penyelidikan dan pemberian tanggapan

Ada dua aspek penting penentu/tuntutan kinerja prima :

1. Keunggulan teknis (profesionalisme) yaitu efisiensi, produktivitas, dan efektifitas.
2. Keunggulan moral (etika) yaitu integritas, obyektivitas, atau imparcialitas, keadilan, kejujuran, dan sebagainya.

Dimensi etika dimasukkan dalam pertimbangan atau keputusan pelayanan publik, karena pelayanan publik ditujukan untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan Negara. Etika digunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan sebagai criteria untuk menilai baik-buruknya keputusan. Selain itu, hubungan etika dan pelayanan publik tercermin dalam kenyataan bahwa warga negara telah mempercayakan sumber daya publik kepada birokrasi (sebagai pengelola sumber daya dan penjaga kepercayaan yang diamanatkan oleh warga negara). Kemudian, nilai-nilai tertinggi yang harus diacu oleh aparatur pelayanan publik (birokrasi) adalah nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 (konstitusi), dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sedangkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah : PP No. 42 Tahun 2004 (Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS), UU No. 8 Tahun 1974 Jo UU No. 43 Tahun 1999 (Pokok-Pokok Kepegawaian), PP No. 30 Tahun 1980 (Peraturan Disiplin PNS), dan UU No. 25 Tahun 2009 (Pelayanan Publik).

#### **D. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) ATAU BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.**

Suatu lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan penyelenggaraan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera secara menyeluruh dan terpadu. Dalam Peraturan presiden no. 62 Tahun 2010 tentang BKKBN menjelaskan Tugas dan Fungsi utama dari BKKBN sesuai yang tertera pada **Pasal 2** dan **Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)**. Untuk lebih rincinya tugas BKKBN diatur oleh Pepres ini yang terdapat pada **Pasal 2** yang berbunyi:

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana

Sedangkan untuk fungsinya sendiri tertera pada **Pasal 3 ayat (1)**, yang berbunyi:

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana



- b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- f. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian pertumbuhan penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Disamping itu adapun Kewenangan, Fungsi dan Tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau disingkat dengan BKKBN yakni :

#### A. Kewenangan

- a. Pembinaan dan peningkatan Kemandirian keluarga berencana.
- b. Promosi dan pergerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- c. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi.
- d. Pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan keluarga berencana

- e. Peningkatan kualitas manajemen program.
- f. Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk.
- g. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antar aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.
- h. Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.

#### B. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- f. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- g. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

- h. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
- k. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

### C. Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengerem laju pertumbuhan penduduk di era otonomi daerah, tahun ini pelaksanaan desentralisasi kewenangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus tuntas. Meski peran BKKBN membantu meningkatkan kesejahteraan warga cukup dominan, kenyataan di daerah menunjukkan, lembaga itu kurang diminati.

Bisa jadi daerah pertama di Indonesia yang mengakomodasi penyerahan kewenangan BKKBN, sekaligus menempatkannya dalam posisi strategis. Jauh sebelum pusat menggembar-gemborkan pentingnya desentralisasi kebijakan KB, Kabupaten Pinrang telah menerbitkan Perda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Termasuk

perubahan BKKBN menjadi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Dinas KB dan PP).

Salah satu instansi penyedia pelayanan yang masih dipertanyakan kualitas pelayanannya adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Terutama yang disorot dalam pelaksanaannya adalah program Keluarga Berencana yang berfungsi menekan laju pertumbuhan. Setelah program KB yang semula dipegang oleh BKKBN ini melebur untuk tingkat kota dan kabupaten, yang mana itu sendiri pelaksanaannya dijalankan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, mulai muncul semacam keraguan apakah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dapat meneruskan tren positif pelaksanaan program KB.

#### **E. DASAR HUKUM BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKB dan PP)**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan, di dalam Peraturan Daerah tersebut ada tercantum tugas pokok Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pinrang dalam pasal 3 menyatakan bahwa:

*"Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas tertentu dalam menentukan kebijakan di bidang pengendalian dan Pengelolaan program*

*Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Ada pula dalam pasal 4 menyatakan bahwa:

*untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :*

- a. Menyusun rencana Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.*
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.*
- c. Pelaksanaan informasi, dokumentasi, pendataan dan pengelolaan data serta analisis dan evaluasi program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.*
- d. Penyusunan program analisis, evaluasi, pelaporan, dan penyajian data informasi keluarga.*
- e. Penyusunan laporan pengelolaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan*
- f. Pelaksanaan program pengembangan keluarga sejahtera, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan ketahanan keluarga.*
- g. Penguatan kelembagaan, jaringan informasi keluarga dan kemitraan.*
- h. Penjalinan kemitraan dengan instansi pemerintah, LSM, swasta dan masyarakat.*
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.*
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.*

BKKBN kabupaten Pinrang haruslah menjadikan acuan dalam melaksanakan Kewenangan BKKBN di bidang Pelayanan Publik, demi terwujudnya kepastian hukum, menurut kepala BKKBN Kabupaten Pinrang Drs.H.Andi Pabiseangi, Msi, adapun Kewenangan program kerja BKB dan PP dalam hal pelayanan publik di kabupaten pinrang sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana  
(KB)

2. Program Pelayanan Pusat Informasi dan Konseling,  
Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Program Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi  
(KIE)
4. Program Bina Keluarga Balita (BKB)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul yang dipilih, penulis mengadakan penelitian pada kantor Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kabupaten Pinrang. Alasan memilih lokasi penelitian di kantor Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kabupaten Pinrang karena sumber data yang ditinjau dan diteliti berada di Kabupaten Pinrang sesuai dengan judul penulis .

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan langsung dengan responden yang dapat mewakili beberapa sumber dalam hal ini adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB dan PP).
2. Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan atau internet, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

3. Penelitian lapangan (Field Research).

### **D. Analisis Data**

Untuk menganalisis kewenangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB dan PP) di bidang pelayanan publik. Maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan baik secara primer dan sekunder, dan analisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan erat dengan pembahasan penulis.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB dan PP) di bidang Pelayanan Publik di Kabupaten Pinrang**

Revitalisasi yang dilakukan saat ini bisa dilihat dengan berubahnya BKKBN untuk tingkat kabupaten atau kota, dimana pada saat ini BKKBN tingkat kabupaten dan kota kebanyakan bergabung dan melebur kedalam beberapa instansi. Seperti halnya di Kabupaten Pinrang, kita sudah tidak bisa menemui BKKBN tingkat Kabupaten sebagai suatu Badan yang berdiri sendiri. BKKBN untuk tingkat Kabupaten Pinrang sudah melebur dan bergabung menjadi satu dengan kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008. Perubahan-perubahan ini tentunya juga berdampak terhadap kinerja baik itu secara teknis maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pendistribusian alat kontrasepsi.

Selain dari pada itu, adapun kewenangan Pelayanan Publik Menurut Kepala Badan BKB dan PP Kabupaten Pinrang Drs.H.Andi Pabiseangi, Msi yang menyebutkan antara lain :

1. *Program Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana (KB)*
2. *Program Pelayanan Pusat Informasi dan Konseling, Kesehatan Reproduksi Remaja*
3. *Program Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)*
4. *Program Bina Keluarga Balita (BKB)*

### 1. Program Pelayan Kontrasepsi dan KB

Dalam program pelayanan Kontrasepsi dan KB Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai kewenangan menyediakan alat kontrasepsi, pil KB dan bekerja sama dengan instansi lain yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkeluarga untuk pengendalian angka kelahiran bayi atau anak.

### 2. Program Pelayanan Pusat Informasi dan Konseling, Kesehatan Reproduksi Remaja

Dalam pelayanan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai kewenangan memperkenalkan keberadaan PIK-KRR kepada semua pihak terkait (*stakeholders*) dalam rangka memperluas akses dan pengembangan dukungan dan jaringan PIK-KRR dan bekerjasama sama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, camat dan kepala desa/lurah.

### 3. Program Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Dalam rangka pelaksanaan program KIE dan KRR, BKKBN atau BKB dan PP kabupaten Pinrang melaksanakan advokasi, promosi, KIE konseling dan pelayanan KRR melalui kelompok kegiatan mass media, maupun melalui pusat informasi dan konsultasi (PIK-KRR) oleh karena itu petugas BKKBN atau BKB dan PP menganjurkan kepada

Kepala, Dinas/Badan/Kantor pengelola Program KB memperbanyak dan menyebarluaskan ke kelompok kegiatan binaan BKKBN, oleh karena itu kita dapat melihat BKKBN atau BKB dan PP bekerjasama antara instansi-instansi pemerintah dalam pelayanan ini.

#### 4. Program Bina Keluarga Balita

Gerakan Program Bina Keluarga Balita (BKB) yang lahir dari prakarsa Menteri Negara Peranan Wanita, dalam pelaksanaan operasionalnya bekerjasama dengan sektor-sektor dan LSM terkait, merupakan salah satu upaya yang berkontribusi dalam pemberdayaan orang tua (Ayah dan Ibu) sebagai pendidik pertama dan utama dari generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas.

Adapun instansi yang terkait dengan berjalannya Kewenangan program kerja BKKBN atau BKB dan PP dalam hal pelayanan publik di kabupaten pinrang adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan.

Bentuk kerjasama BKKBN atau BKB dan PP dengan Dinas Kependudukan adalah Mengendalikan Laju pertumbuhan penduduk sehingga tidak terjadi kepadatan penduduk di kabupaten Pinrang, jadi secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah atribusi sebagai mana yang di jelaskan diatas bahwa kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam bidang pelayanan publik dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 18 Tahun 2008. Sedangkan bentuk kerjasama BKKBN dengan Dinas Kesehatan adalah di bidang

Keluarga Berencana (KB) dan program-program lainnya yang menyangkut dengan Kesehatan dan Keluarga Berencana, dalam hal ini BKKBN atau BKB dan PP berwenang menyediakan Alat dan obat-obatan dan Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan melaksanakan program kerja yang dilaksanakan oleh BKKBN atau BKB dan PP dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan memberikan atau membagikan alat kontrasepsi dan menganjurkan keluarga untuk mengkonsumsi pil KB untuk mengatur angka kelahiran anak.

**B. Hambatan-Hambatan Dalam Cakupan Kewenangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB dan PP) Dalam Bidang Pelayanan Publik Di Kab.Pinrang**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB dan PP) di bidang Pelayanan Publik dilaksanakan dengan koordinasi antara instansi Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Instansi-instansi Pemerintah yang lain.

Seperti yang dijelaskan oleh kepala BKKBN atau BKB dan PP Kab.Pinrang Drs.H.Andi Pabiseangi, Msi menjelaskan bahwa :

*Kendala dalam pelaksanaan kewenangan BKKBN atau BKB dan PP di bidang Pelayanan Publik di Kab.Pinrang adalah interpretasi terhadap Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kab.Pinrang, keterbatasan dana atau biaya mengakibatkan kewenangan BKKBN atau BKB dan PP dalam bidang pelayanan publik menjadi terhambat dan kurangnya pergerakan toko-toko agama dan masyarakat.*

Interpretasi yang terkandung dalam Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa BKKBN atau dengan istilah sekarang Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB dan PP) di Kabupaten Pinrang, di selenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan di berikan tugas kepada BKB dan PP membantu Kepala daerah dalam melaksanakan tugas tertentu dalam menentukan kebijakan di bidang pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, kewenangan BKB dan PP ada pada Pemerintah Daerah.

Sampai saat ini BKKBN atau BKB dan PP di Kab.Pinrang melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan publik masih mengalami keterbatasan. Kemampuan pemerintah daerah semakin terbatas dalam membiayai pelaksanaan program kerja BKKBN atau BKB dan PP dalam bidang Pelayanan Publik. Karena dari program-program yang di laksanakan BKKBN atau BKB dan PP di bidang pelayanan publik sangat menentukan dari biaya atau dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sumber pembiayaan sampai saat ini masih terbatas jumlahnya, alat dan obat-obatan dari dana alokasi usus masih kurang, namun perhatian pemerintah pada BKKBN atau BKB dan PP dalam bidang pelayanan publik masih kurang.

Seperti yang di jelaskan oleh kepala BKKBN atau BKB dan PP Kab.Pinrang Drs.H.Andi Pabiseangi, Msi menjelaskan bahwa :

*Kendala yang paling menghambat dalam pelayanan publik adalah dana. Hal ini disebabkan karena tidak adanya koordinasi yang baik antara Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan dengan pemerintah daerah dan pemerintah propinsi dalam mengalokasikan anggaran. Meskipun setiap dinas mengalokasikan anggaran untuk pelayanan publik di BKKBN yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan dapat berjalan dengan baik.*

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa kedua instansi yang diharapkan untuk membantu BKKBN atau BKB dan PP belum maksimal dalam pelayan publik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui prosedur pengumpulan data dan analisis data tentang Kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB dan PP) di Bidang Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan BKKBN atau BKB dan PP di bidang Pelayanan Publik di laksanakan dan bekerja sama oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan. BKKBN atau BKB dan PP bekerjasama dengan Dinas Kesehatan di bidang Keluarga Berencana (KB) dan program-program yang berkaitan dengan kesehatan seperti pelayanan pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja, pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan program Bina keluarga balita , BKKBN atau BKB dan PP berwenang menyediakan Alat dan obat-obatan dan Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan melaksanakan program kerja yang di laksanakan oleh BKKBN atau BKB dan PP dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan memberikan atau membagikan alat kontrasepsi dan menganjurkan keluarga untuk mengkonsumsi pil KB untuk mengatur angka kelahiran anak. Sedangkan Dinas Kependudukan adalah Mengendalikan Laju pertumbuhan penduduk sehingga tidak terjadi kepadatan penduduk di kabupaten Pinrang

2. Hambatan-hambatan dalam cakupan kewenangan BKKBN atau BKB dan PP dalam bidang Pelayanan Publik adalah :
  - a) Interpretasi Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tidak mendorong Pengembangan dan Kerjasama antar Daerah dalam Pelayanan Publik.
  - b) Keterbatasan pembiayaan mengakibatkan kurangnya pergerakan BKKBN atau BKB dan PP di Bidang Pelayanan Publik.
  - c) Kurangnya pergerakan Toko Agama dan Masyarakat dalam pelaksanaan program kerja BKKBN atau BKB dan PP di Bidang Pelayanan Publik.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang segera bertindak atau memberikan masukan dan Membantu BKKBN atau BKB dan PP Kabupaten Pinrang di bidang Pelayanan Publik, karena persoalan di bidang Pelayanan Publik tidak hanya terbatas pada kerja sama Instansi, akan tetapi termasuk juga bantuan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
2. Kepada pihak Toko Agama dan Masyarakat untuk senantiasa membantu atau aktif dalam pelaksanaan program kerja BKKBN atau BKB dan PP di bidang Pelayanan Publik dan pemberian tenaga medis yang memadai.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Firmansyah.2005. ***Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara***.Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN): Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. ***Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi***. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta.
- Ahmad Sukardja, 2012, ***Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Siasah***, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, ***Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia***, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Gede Pantja Astawadan SuprinNa'a, ***Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara***, Refika Aditama, Bandung, 2009,
- Mexsasailendra, 2011, ***Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia***, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Natabaya, H. A. S. 2004. ***Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi***. Konstitusi Press: Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2010, ***Hukum Tata Negara Indonesia***. Edisi revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Romi Librayanto, 2008, ***Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia***, Makassar. Pu KAP- Indonesia.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. ***Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945***. Prenada Media: Jakarta.
- Termorshuizen, Marjanne. 2002. ***Kamus Hukum Belanda – Indonesia***, Djambatan: Jakarta

**Makalah :**

**MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA** Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

**PERKEMBANGAN DAN KONSOLIDASI LEMBAGA NEGARA PASCA REFORMASI** Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Philipus M. Hadjon, **tentang Wewenang**, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun.

Suwoto Mulyosudarmo, **Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridis Pertanggung jawaban Kekuasaan**, Universitas Airlangga, Surabaya

### **Peraturan Perundang-undangan**

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 perubahan pertama sampai dengan keempat.

**Peraturan** Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepmenpan nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik

**Peraturan** Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PP No. 42 Tahun 2004 (Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS)

UU No. 8 Tahun 1974 dan UU No. 43 Tahun 1999 (Pokok-Pokok Kepegawaian),

PP No.30 Tahun 1980 (Peraturan Disiplin PNS), dan UU No.25 Tahun 2009 (Pelayanan Publik).

**Peraturan** Daerah No. 18 Tahun 2008 Tentang Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pinrang.

**Keputusan** Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

### **Website**

[http://arsyadshawir.blogspot.com/2011\\_12\\_01\\_archive.html](http://arsyadshawir.blogspot.com/2011_12_01_archive.html)

<http://www.bkkbn.go.id>

<http://mediabelab.blogspot.com/2012/10/skripsi-analisis-peran-pemerintah-dalam.html>

<http://www.tutorialto.com/pendidikan/864-jumlah-penduduk-indonesia-2012.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan\\_publik](http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik)

<http://poepoetrlangga.blogspot.com/2012/12/optimalisasi-layanan-informasi-untuk.html>